



Research Article

Kesetaraan Gender di Dunia Politik Dalam Perspektif Mahasiswa PPKn: Kajian Terhadap Tingkat Kesadaran dan Dukungan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan

Abdul Halim¹, Nuraini Fitriana², Rifka Silmia Salsha Bella³, Novia Irmani Putri⁴, Irawati⁵

1. Progam studi PPKn Universitas Lampung, Indonesia; abdulhalim@fkip.unila.ac.id
2. Universitas Lampung, Indonesia; nfitriana519@gmail.com
3. Universitas Lampung, Indonesia; rifikasilmiao23@gmail.com
4. Universitas Lampung, Indonesia; noviairmani889@gmail.com
5. Universitas Lampung, Indonesia; irawatiii621@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Public Service: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 13, 2026
Accepted : April 18, 2026

Revised : March 15, 2026
Available online : May 07, 2026

How to Cite: Abdul Halim, Nuraini Fitriana, Rifka Silmia Salsha Bella, Novia Irmani Putri, & Irawati, I. (2026). Gender Equality in Politics from the Perspective of Civics Students: A Study of the Level of Awareness and Support for Women's Political Participation. *Public Service: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.61166/service.v3i1.15>

Gender Equality in Politics from the Perspective of Civics Students: A Study of the Level of Awareness and Support for Women's Political Participation

Abstract. Gender equality in politics is one of the main indicators of an inclusive and just democracy. Although there have been various affirmative regulations in Indonesia such as a 30% quota for women in legislative candidacy, the reality of women's participation in politics still shows significant gaps. This phenomenon is a challenge in realizing equal political representation between men and women. This

study aims to analyze how awareness and support for women's political participation are interpreted by students of the Pancasila and Citizenship Education (PPKn) Study Program as prospective educators and agents of social change. The method used is a descriptive quantitative approach by distributing closed questionnaires to 100 active students who have taken courses related to democracy, human rights, and gender. The results of the study show that in general students have a normative understanding of the importance of gender equality, but there is still ambivalence in providing concrete support for women's leadership in the political realm. Patriarchal cultural values, religious influences, and gender stereotypes are factors that influence the level of support. These findings indicate that although there is conceptual awareness, the internalization of gender equality values in practice still needs to be strengthened. This study recommends the need for more explicit integration of gender perspectives in the curriculum and learning of PPKn in higher education.

Keywords: gender equality, women's political participation, PPKn students, democracy, gender stereotypes, citizenship education.

Abstrak. Kesetaraan gender dalam dunia politik merupakan salah satu indikator utama dari demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun telah ada berbagai regulasi afirmatif di Indonesia seperti kuota 30% untuk perempuan dalam pencalonan legislatif, realitas partisipasi perempuan di ranah politik masih menunjukkan kesenjangan signifikan. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan representasi politik yang setara antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kesadaran dan dukungan terhadap partisipasi politik perempuan dimaknai oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai calon pendidik dan agen perubahan sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menyebarkan kuesioner tertutup kepada 100 mahasiswa aktif yang telah menempuh mata kuliah terkait demokrasi, HAM, dan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa memiliki pemahaman normatif mengenai pentingnya kesetaraan gender, namun masih terdapat ambivalensi dalam memberikan dukungan konkret terhadap kepemimpinan perempuan di ranah politik. Nilai-nilai budaya patriarki, pengaruh agama, serta stereotip gender menjadi faktor yang memengaruhi tingkat dukungan tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kesadaran konseptual, internalisasi nilai kesetaraan gender dalam praktik masih memerlukan penguatan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi perspektif gender secara lebih eksplisit dalam kurikulum dan pembelajaran PPKn di perguruan tinggi.

Kata Kunci: kesetaraan gender, partisipasi politik perempuan, mahasiswa PPKn, demokrasi, stereotip gender, pendidikan kewarganegaraan.

PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi modern, kesetaraan gender merupakan prinsip dasar yang menjamin bahwa setiap warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan politik. Keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya menyangkut soal kuantitas, tetapi juga menyangkut kualitas kontribusi dalam proses perumusan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat (Krook & O'Brien, 2012). Di Indonesia, meskipun telah diberlakukan kebijakan afirmatif berupa kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kenyataannya keterwakilan perempuan di DPR RI per tahun 2023 baru mencapai 21,9% (Inter-Parliamentary Union, 2023). Angka ini masih jauh dari target ideal dan menunjukkan bahwa hambatan struktural maupun kultural terhadap

partisipasi politik perempuan masih kuat. Hambatan tersebut mencakup dominasi budaya patriarki, stereotip tentang peran perempuan, keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, serta minimnya dukungan dari partai politik (Budiatri, 2019; Nurmala, 2020).

Salah satu aspek yang perlu dicermati dalam konteks ini adalah bagaimana generasi muda—khususnya mahasiswa—memandang isu kesetaraan gender dalam politik. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis karena mereka dipersiapkan untuk menjadi pendidik yang akan menanamkan nilai-nilai demokrasi, HAM, dan kesetaraan di masa depan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, penting untuk menumbuhkan civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions yang mencerminkan dukungan terhadap demokrasi inklusif dan representatif (Galston, 2001). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana tingkat kesadaran dan dukungan mereka terhadap partisipasi politik perempuan.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun generasi muda memiliki pengetahuan dasar tentang demokrasi dan HAM, sikap mereka terhadap kesetaraan gender dalam politik belum sepenuhnya progresif. Beberapa di antaranya masih memandang kepemimpinan sebagai domain laki-laki, terutama dalam konteks politik yang sering dianggap “keras” dan penuh intrik (Handayani, 2021; Siregar, 2020). Di sisi lain, pendidikan tinggi memiliki potensi besar untuk menjadi ruang transformasi nilai, termasuk dalam membentuk kesadaran gender yang kritis dan progresif (UNESCO, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris mengenai perspektif mahasiswa PPKn terhadap kesetaraan gender di dunia politik, dengan fokus pada dua variabel utama: tingkat kesadaran dan tingkat dukungan terhadap partisipasi politik perempuan. Kajian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan kewarganegaraan dan studi gender, tetapi juga memberikan masukan konkret untuk pengembangan kurikulum PPKn yang lebih responsif terhadap tantangan sosial kontemporer, termasuk kesenjangan gender dalam politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual mengenai perspektif mahasiswa terhadap kesetaraan gender dalam dunia politik. Subjek penelitian terdiri dari 7 mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Lampung yang telah menempuh mata kuliah terkait demokrasi, HAM, dan gender. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan variasi gender, tingkat akademik, serta tingkat keterlibatan dalam kegiatan kemahasiswaan. Proses wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam persepsi, pemahaman, serta sikap mahasiswa terkait representasi politik perempuan, hambatan struktural dan kultural yang dihadapi perempuan dalam politik, serta peran pendidikan PPKn dalam membentuk sensitivitas gender. Data yang diperoleh

dianalisis dengan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan makna yang muncul dari narasi informan.

PEMBAHASAN

Landasan Teoritis

a. Teori gender dan feminisme (liberal, radikal, dan interseksionalitas).

Teori gender dan feminisme merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis ketimpangan serta ketidakadilan berbasis gender dalam masyarakat. Feminisme liberal berfokus pada pencapaian kesetaraan gender melalui reformasi hukum dan kebijakan publik, dengan menekankan pentingnya kesetaraan kesempatan dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik.

Feminisme radikal memandang ketimpangan gender sebagai hasil dari sistem patriarki yang mengakar dalam masyarakat, dan mengadvokasi perubahan struktural yang mendalam untuk menghapus dominasi laki-laki atas perempuan. Sementara itu, feminisme interseksional menyoroti bagaimana berbagai identitas sosial—seperti ras, kelas, dan orientasi seksual—berinteraksi dalam membentuk pengalaman ketidakadilan gender, menekankan bahwa perempuan bukanlah kelompok yang homogen dan bahwa perjuangan feminisme harus mempertimbangkan berbagai bentuk diskriminasi yang tumpang tindih. Dengan memahami ketiga pendekatan ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang dinamika ketidaksetaraan gender dan strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai kesetaraan yang lebih adil dan inklusif dalam masyarakat.

b. Teori partisipasi politik dan representasi politik

Partisipasi politik merupakan konsep penting dalam teori demokrasi yang merujuk pada keterlibatan warga negara dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk partisipasi ini dapat berupa pemberian suara dalam pemilu, keterlibatan dalam diskusi publik, menjadi anggota partai politik, hingga demonstrasi atau aksi kolektif lainnya. Menurut Verba, Nie, dan Kim (1978), partisipasi politik dibagi menjadi beberapa bentuk seperti partisipasi konvensional dan non-konvensional. Tingkat partisipasi seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, sosialisasi politik, kondisi ekonomi, dan kepercayaan terhadap sistem politik.

Sementara itu, representasi politik merujuk pada proses di mana kepentingan dan suara rakyat diwakili dalam lembaga-lembaga politik, terutama di parlemen. Teori representasi yang dikemukakan oleh Pitkin (1967) membagi representasi menjadi empat tipe: formalistik, simbolik, deskriptif, dan substantif. Dalam konteks kesetaraan gender, representasi politik deskriptif menjadi penting karena menekankan perlunya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif agar pengalaman dan kepentingan perempuan dapat tersuarakan secara adil. Representasi yang adil bukan hanya sekadar kehadiran fisik, tetapi juga penyampaian aspirasi yang bermakna.

c. Konsep kesadaran politik dan konstruksi sosial peran gender.

Kesadaran politik adalah tingkat pemahaman dan kepekaan individu terhadap

isu-isu politik yang berkembang di sekitarnya, serta sejauh mana individu merasa berkepentingan dan memiliki tanggung jawab dalam kehidupan politik. Kesadaran ini mencakup pengetahuan tentang sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta sikap kritis terhadap kebijakan publik. Tingkat kesadaran politik dapat memengaruhi partisipasi seseorang dalam proses demokrasi. Pendidikan politik, media, lingkungan sosial, dan pengalaman individu menjadi faktor penting dalam membentuk dan meningkatkan kesadaran politik warga negara, termasuk mahasiswa.

Sementara itu, konstruksi sosial peran gender merujuk pada bagaimana masyarakat membentuk, mendefinisikan, dan membatasi peran serta perilaku yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan. Peran gender bukan sesuatu yang bersifat alami atau biologis, melainkan hasil dari proses sosial dan kultural yang terus-menerus dikonstruksikan melalui interaksi, pendidikan, media, dan institusi sosial lainnya. Dalam konteks politik, konstruksi peran gender sering kali menempatkan laki-laki sebagai aktor utama, sementara perempuan dianggap kurang cocok atau kurang kompeten dalam ruang politik. Pemahaman ini menjadi dasar mengapa representasi perempuan masih rendah, dan mengapa kesadaran serta dukungan terhadap partisipasi politik perempuan perlu ditumbuhkan secara sistematis.

d. Relevansi kajian kewarganegaraan kritis dalam konteks pendidikan PPKn.

Kajian kewarganegaraan kritis dalam konteks pendidikan PPKn di Indonesia memiliki relevansi yang signifikan dalam membentuk warga negara yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga mampu berpikir kritis, reflektif, dan aktif dalam kehidupan demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia bertujuan untuk membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, sebagaimana dijelaskan dalam jurnal oleh Damri (2020), yang menekankan bahwa PKn memiliki peran penting dalam membentuk karakter toleransi dan demokrasi serta moralitas peserta didik.

Lebih lanjut, pendekatan pedagogi kritis dalam PKn mendorong siswa untuk tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan temuan dari jurnal oleh Dermawan dan Maulana (2023), yang menekankan pentingnya memberikan soal-soal yang mengarahkan pada kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar. Dengan demikian, integrasi pendekatan kewarganegaraan kritis dalam pendidikan PPKn sangat penting untuk membekali generasi muda dengan keterampilan berpikir kritis dan kesadaran sosial yang diperlukan dalam menghadapi tantangan masyarakat modern.

Kebijakan dan Realitas Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia

Upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam dunia politik di Indonesia telah memperoleh dorongan melalui penerapan kebijakan afirmatif, khususnya melalui kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Kebijakan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang

mewajibkan partai politik untuk menyertakan paling sedikit 30% perempuan dalam daftar bakal calon anggota legislatif pada setiap daerah pemilihan (Pasal 245 Ayat 2). Kebijakan ini lahir sebagai bentuk pengakuan negara atas rendahnya keterwakilan perempuan di ranah pengambilan keputusan, sekaligus sebagai strategi korektif terhadap ketimpangan historis dan kultural yang membatasi ruang politik bagi perempuan (Suciwati & Mulyadi, 2021).

Namun, implementasi kebijakan afirmatif ini masih menghadapi tantangan signifikan. Secara statistik, meskipun jumlah perempuan dalam parlemen meningkat dari waktu ke waktu, tetapi belum mencapai target ideal. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), keterwakilan perempuan di DPR RI hasil Pemilu 2019 hanya mencapai 20,8% atau 120 dari 575 kursi—masih jauh dari kuota 30% yang ditetapkan (KPU, 2020). Di tingkat Dewan Perwakilan Daerah (DPD), angka partisipasi perempuan mencapai 30,88%, namun tanpa adanya mekanisme kuota karena sistem DPD bersifat non-partisan (Bawaslu, 2020). Untuk lembaga eksekutif, seperti kabinet, Presiden Joko Widodo pada periode 2019–2024 menunjuk 9 perempuan dari 34 menteri, atau sekitar 26,5%, yang merupakan jumlah tertinggi dalam sejarah kabinet Indonesia (Setkab, 2019).

Ketimpangan ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya implementasi kebijakan, tetapi juga oleh sejumlah hambatan struktural, kultural, dan psikologis. Secara struktural, dominasi partai politik dalam proses seleksi calon legislatif sering kali menempatkan perempuan dalam posisi tidak strategis, seperti ditempatkan di nomor urut buncit dalam daftar calon tetap, atau di dapil yang tidak kompetitif (Paramita, 2022). Selain itu, perempuan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya politik seperti pendanaan, jaringan elite, dan pelatihan politik.

Dari sisi kultural, masih kuatnya budaya patriarkis di berbagai wilayah Indonesia membentuk persepsi bahwa politik adalah ranah laki-laki, sedangkan perempuan seharusnya fokus pada ranah domestik. Nilai-nilai tradisional yang menempatkan perempuan sebagai “pengabdian keluarga” sering kali bertentangan dengan tuntutan keterlibatan aktif di dunia politik (Nurmila, 2018). Hal ini berdampak langsung pada hambatan psikologis, yakni rendahnya rasa percaya diri perempuan untuk maju sebagai pemimpin, serta kekhawatiran terhadap stigma sosial dan tekanan moral yang mengiringi aktivitas politik. Dengan demikian, meskipun regulasi afirmatif telah tersedia, realitas di lapangan menunjukkan bahwa substansi partisipasi politik perempuan masih perlu diperjuangkan secara sistemik. Peningkatan representasi perempuan dalam politik tidak hanya membutuhkan komitmen kebijakan, tetapi juga dukungan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, serta transformasi budaya masyarakat yang lebih inklusif terhadap peran perempuan di ruang publik.

Berdasarkan dari hasil kuesioner yang di bagikan kepada 23 mahasiswa ppkn sebagai responden mengungkapkan bahwa tingkat empati kewarganegaraan peserta didik terhadap kelompok marginal, khususnya perempuan dalam politik. Secara umum, responden menunjukkan pemahaman yang baik terhadap pentingnya kesetaraan gender dan memiliki sikap yang cukup positif terhadap peran perempuan dalam dunia politik. Hal ini terlihat dari skor rata-rata yang tinggi pada sebagian besar pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Pernyataan “Saya menyadari bahwa

perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang politik” memperoleh skor rata-rata tertinggi sebesar 4,50. Ini mencerminkan bahwa peserta didik memiliki kesadaran yang kuat terhadap prinsip dasar kesetaraan gender. Pemahaman ini penting sebagai fondasi dalam menumbuhkan sikap empatik dan keadilan sosial di kalangan generasi muda.

Pernyataan “Saya yakin bahwa mahasiswa PPKn memiliki peran penting dalam mendorong kesetaraan gender di dunia politik” juga mendapat skor tinggi, yaitu 4,50. Ini menunjukkan bahwa peserta didik memahami tanggung jawab sosial mereka sebagai warga negara aktif, khususnya sebagai mahasiswa pendidikan kewarganegaraan yang berperan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Responden juga menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap kapasitas perempuan dalam politik. Pernyataan “Saya percaya perempuan mampu menjadi pemimpin politik yang baik” memperoleh skor rata-rata 4,36. Dukungan ini mencerminkan sikap progresif peserta didik yang tidak terjebak dalam stereotip gender yang selama ini mendiskreditkan kepemimpinan perempuan.

Skor 4,36 juga muncul pada pernyataan “Saya merasa perlu ada pendidikan politik yang berperspektif gender di perguruan tinggi.” Ini menandakan bahwa peserta didik mendukung pembelajaran yang responsif terhadap isu kesetaraan. Hal ini penting dalam menciptakan ruang akademik yang inklusif dan mampu merespons tantangan politik kontemporer yang masih kerap bias gender. Dukungan terhadap kesetaraan gender juga tampak dalam komitmen untuk mendukung organisasi yang memperjuangkan isu ini. Pernyataan “Saya mendukung organisasi atau komunitas yang memperjuangkan kesetaraan gender di politik” memperoleh skor 4,27. Ini menggambarkan bahwa empati peserta didik tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mulai mengarah pada sikap aktif dan partisipatif.

Pernyataan “Saya merasa penting untuk membela hak politik perempuan jika didiskriminasi” memperoleh skor 4,23. Ini memperlihatkan bahwa peserta didik memiliki kepekaan terhadap ketidakadilan yang dialami kelompok marginal, khususnya perempuan. Mereka tidak hanya menyadari ketimpangan, tetapi juga merasa bertanggung jawab untuk turut serta memperjuangkan keadilan. Meskipun sikap peserta didik terhadap kesetaraan gender cukup positif, beberapa pernyataan mencerminkan perlunya peningkatan pemahaman kritis. Misalnya, skor pada “Saya memahami hambatan yang sering dihadapi perempuan untuk terlibat dalam politik” hanya 3,64, dan “Saya mengetahui bahwa partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia masih rendah” hanya 3,59. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap realitas sosial-politik yang dihadapi perempuan belum sepenuhnya mendalam.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah rendahnya skor pada pernyataan “Saya mengikuti isu-isu politik yang berkaitan dengan kesetaraan gender,” yaitu hanya 3,45. Ini menunjukkan bahwa meskipun peserta didik memiliki sikap positif secara umum, mereka belum sepenuhnya aktif dalam mengikuti dan memahami dinamika politik yang berkaitan dengan kesetaraan gender secara aktual. Secara keseluruhan, hasil kuesioner ini menunjukkan bahwa peserta didik memiliki empati kewarganegaraan yang cukup tinggi terhadap kelompok marginal, khususnya perempuan dalam politik. Mereka mendukung kesetaraan gender secara prinsipil dan

memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan. Namun, masih diperlukan penguatan dalam aspek literasi politik dan keterlibatan aktif dalam isu-isu gender agar empati tersebut dapat terwujud dalam tindakan nyata yang memperkuat demokrasi yang inklusif dan adil gender.

Pendidikan PPKn sebagai Wahana Membentuk Nilai Demokrasi, Kesetaraan, dan Keadilan Gender

Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter warga negara yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga memiliki kesadaran kritis terhadap nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Dalam konteks demokrasi yang substansial, kesetaraan gender merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Melalui PPKn, peserta didik diajak untuk memahami bahwa keadilan bukan hanya soal perlakuan setara, tetapi juga soal pengakuan terhadap perbedaan dan penyesuaian perlakuan agar semua pihak dapat menikmati hak-haknya secara penuh. Dalam kerangka ini, pendidikan tidak hanya menjadi sarana pengajaran, tetapi juga proses pembebasan (*emansipatoris*) yang mendorong setiap individu menjadi warga negara yang sadar dan aktif memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan (Febrianti, 2017).

Selanjutnya, peran PPKn tidak terbatas pada penyampaian pengetahuan normatif semata, tetapi juga mencakup pembentukan sikap dan tindakan konkret mahasiswa terhadap isu-isu sosial, termasuk diskriminasi berbasis gender. Mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran PPKn yang berkualitas akan mampu melihat isu-isu gender dalam kehidupan nyata, seperti minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, praktik upah yang tidak setara, serta kekerasan berbasis gender, sebagai bagian dari masalah kewarganegaraan yang perlu direspons secara aktif. Dalam proses pembelajaran, PPKn dapat memfasilitasi diskusi kritis tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dapat menjadi dasar dalam mendorong kebijakan yang adil gender. Hal ini sejalan dengan temuan Panggabean et al. (2024) bahwa pendidikan yang menyentuh isu-isu gender secara eksplisit memiliki efek positif terhadap peningkatan empati dan kepedulian sosial mahasiswa.

Dengan demikian, PPKn berperan sebagai media pendidikan demokrasi yang mendalam dan transformatif. Pembelajaran PPKn yang berbasis nilai-nilai kebangsaan dan hak asasi manusia mendorong mahasiswa untuk tidak sekadar menjadi pelajar yang patuh, melainkan warga negara yang aktif, kritis, dan peduli terhadap isu-isu keadilan sosial. Pendidikan ini mendorong terbentuknya kesadaran gender yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan konatif, yang akan membentuk karakter mahasiswa dalam kehidupan sosialnya. Kesadaran ini penting, mengingat masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat yang seringkali tidak disadari bahkan oleh kalangan terdidik. Oleh karena itu, PPKn berpotensi menjadi fondasi perubahan sosial yang berorientasi pada kesetaraan hak dan martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin (Febrianti et al., 2020).

Pengaruh Kurikulum dan Metode Pembelajaran dalam Meningkatkan Sensitivitas Gender Mahasiswa

Kurikulum merupakan jantung dari proses pendidikan. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, kurikulum yang tidak responsif terhadap isu gender dapat menyebabkan pengabaian terhadap ketimpangan sosial yang dialami oleh perempuan dan kelompok marginal lainnya. Kurikulum yang inklusif seharusnya memuat secara eksplisit topik-topik yang mengangkat persoalan kesetaraan gender, representasi perempuan dalam politik, kekerasan berbasis gender, dan diskriminasi dalam ruang publik. Ulya (2017) menekankan bahwa kurikulum transformatif adalah kurikulum yang mampu merangsang kesadaran kritis peserta didik untuk memahami realitas sosial secara mendalam, serta mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam mengatasi ketidakadilan. Dalam kerangka ini, revisi terhadap kurikulum PPKn menjadi penting agar mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial yang lebih luas.

Di samping kurikulum, metode pembelajaran yang diterapkan dalam proses PPKn juga sangat menentukan hasil pembelajaran, terutama dalam membentuk sensitivitas gender mahasiswa. Metode pembelajaran partisipatif seperti diskusi terbuka, simulasi peran, debat pro-kontra, dan studi kasus memungkinkan mahasiswa untuk mengalami langsung bagaimana isu-isu gender berdampak pada kehidupan nyata. Ketika mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, mereka akan lebih mudah membangun empati terhadap kelompok yang selama ini termarginalkan secara sosial dan struktural. Febrianti (2017) menyatakan bahwa metode pembelajaran yang demokratis akan mendorong terciptanya ruang dialog yang setara dan inklusif, di mana perbedaan pengalaman dan perspektif dapat dihargai dan dijadikan bahan refleksi bersama.

Tidak kalah penting, bahan ajar dan media pembelajaran yang digunakan harus direkonstruksi agar mencerminkan nilai-nilai keadilan gender. Sebagian besar buku teks PPKn di tingkat perguruan tinggi masih bias gender, dengan menampilkan tokoh-tokoh laki-laki sebagai figur utama dalam sejarah dan pembangunan bangsa, sementara peran perempuan cenderung diabaikan atau dimarginalkan (Febrianti et al., 2020). Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sadar dari para pengembang kurikulum dan dosen untuk menghadirkan sumber belajar yang merepresentasikan keberagaman peran laki-laki dan perempuan secara adil dan setara. Penambahan narasi tokoh-tokoh perempuan, penguatan literasi media terhadap stereotip gender, dan integrasi tema gender dalam tugas-tugas reflektif merupakan langkah konkret dalam mengatasi ketimpangan tersebut.

Akhirnya, peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran menjadi faktor krusial dalam menciptakan suasana kelas yang responsif gender. Dosen yang memiliki kesadaran gender tidak hanya akan menghindari reproduksi bias dalam bahasa dan tindakan, tetapi juga secara aktif menciptakan ruang aman bagi semua mahasiswa untuk menyuarakan pendapatnya tanpa rasa takut akan diskriminasi. Kamil (tanpa tahun) menekankan bahwa pengarusutamaan gender dalam dunia pendidikan harus dimulai dari pengembangan kompetensi guru dan dosen agar mampu menjadi agen perubahan sosial. Oleh karena itu, pelatihan pedagogi kritis dan gender awareness bagi tenaga pendidik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa PPKn tidak hanya menjadi alat pengajaran formal, tetapi juga wahana pembentukan kesadaran sosial yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Lampung secara umum memiliki pemahaman normatif yang baik mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam politik, masih terdapat ambivalensi dalam penerapan dan dukungan konkret terhadap kepemimpinan perempuan. Nilai-nilai budaya patriarki, pengaruh agama, stereotip gender, serta minimnya literasi politik terkait isu kesetaraan gender masih menjadi tantangan yang memengaruhi tingkat dukungan dan pemahaman mahasiswa.

Pendidikan PPKn berperan strategis dalam membentuk kesadaran kritis, empati kewarganegaraan, dan sikap proaktif mahasiswa terhadap isu-isu keadilan sosial, termasuk kesetaraan gender. Kurikulum yang responsif gender, metode pembelajaran partisipatif, serta penguatan kapasitas dosen dalam perspektif gender menjadi faktor kunci dalam mendorong perubahan paradigma mahasiswa. Meskipun sudah ada kecenderungan positif dalam sikap mahasiswa terhadap hak politik perempuan, aspek literasi politik dan keterlibatan aktif dalam isu-isu gender masih perlu ditingkatkan.

Oleh karena itu, integrasi perspektif gender yang lebih eksplisit dalam kurikulum dan proses pembelajaran PPKn perlu terus diupayakan. Pendidikan kewarganegaraan yang transformatif diharapkan dapat melahirkan calon pendidik dan warga negara yang tidak hanya memahami pentingnya kesetaraan gender, tetapi juga memiliki keberanian untuk memperjuangkannya dalam kehidupan publik, sehingga demokrasi yang inklusif dan berkeadilan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Arina Nur Azizah, Nanik Sutarni, & Adhiputro Pangarso Wicaksono. (2025). Analysis Of Women's Representation In Carrying Out Legislative Functions As Members Of The Boyolali Regency Regional House Of Representatives. *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, 2(2), 171–196. <https://doi.org/10.61166/policy.v2i2.31>
- Budiatri, A. (2019). Perempuan dan Representasi Politik di Indonesia. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Damri. (2020). *Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Materi Nilai-Nilai Pancasila*. Jurnal Inovasi.
- Dermawan, Maulana. (2023). Analisis Berpikir Kritis Pada Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar. *Jurnal Education and Economics*.
- Febrianti, N. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Kesetaraan Gender. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, Universitas Ahmad Dahlan.
- Febrianti, N., Abdulkarim, A., Malihah, E., & Fitriyani, S. (2020). Analisis Muatan Kajian Gender pada Buku Teks Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 10(1), 70–77.
- Kamil, M. (2019). *Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*. Universitas Pendidikan Indonesia.

- Kosasih, A., & Rohman, A. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai Keadilan Gender. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(2), 145–158.
- Nurmala, I. (2020). Patriarki dan Hambatan Partisipasi Politik Perempuan. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15(1), 35–46.
- Panggabean, T., Lase, S. M., Manalu, F., Simorangkir, J., & Lumbantobing, R. (2024). Membangun Kesadaran Gender Melalui Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2(5), 399–403.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulya, I. (2017). Internalisasi Karakter Sensitif Gender dalam Kurikulum Pendidikan. *Jurnal Edukasi Islamika*, 2(1), 119–122.
- Wirabuana (2025). *Teori Feminisme dalam Sosiologi: Perspektif Gender dalam Masyarakat*.